Kajian Ekonomi & Keuangan
http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal

Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kointegrasi dan Kausalitas

Parluhutan Hutahaean*

* Email: lu_hut@yahoo.com

α Alamat: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jalan Raya Puncak No. 72, Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat

Riwayat artikel:

- Diterima 15 Januari 2019
- Direvisi 12 September 2019
- Disetujui 13 September 2019
- Tersedia online Januari 2020

Kata kunci: Belanja Negara; Produk Domestik Bruto (PDB) Konstan; Belanja kementerian/lembaga; Belanja non kementerian/lembaga; transfer ke daerah dan dana desa; Pertumbuhan Ekonomi

JEL Classification : H50, H60

Abstract

Government expenditure has important and strategic impacts on the economy to achieve national development targets. Government expenditure also correlates with economic growth. Recent data show that relatively low rates of economic growth coincide with a relatively high increase in government expenditure allocation. This interesting finding needs to be studied empirically to analyze the relationship between both variables. This research uses five methods of econometric analysis to find the correlation between government expenditure with economic growth. This research concludes that there is a one-way causality relationship from GDP at constant price to Line Ministries' Expenditures, Non-Line Ministry's Expenditures, as well as Regional Transfer Expenditures. Furthermore, this paper also shows that Line Ministries' Expenditures have a significant positive effect on GDP at constant price in the long-term. Moreover, this study finds that a shock in government expenditure has a long term and increasing impact on GDP at constant price. At last, this study also reveals that the role of previous years' GDP at constant price dominates the fluctuation of GDP at constant price.

©2019 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

1. PENDAHULUAN

Belanja negara merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mempertimbangkan teori tersebut, kita dapat simpulkan bahwa belanja negara memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mencapai target pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian negara, maka pengaruh belanja negara terhadap perekonomian juga mengalami transformasi. Tuntutan terhadap efektivitas kinerja pemerintah yang tercermin dalam efisiensi birokrasi dan kapabilitas pemerintah dalam menciptakan inovasi kebijakan semakin tinggi (Wahab. 2004). Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, peran belanja negara perlu sekiranya dijalankan berdasarkan tiga fungsi fiskal utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Sailesh K.Jha, 1999).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menjelaskan tiga fungsi utama anggaran negara, yakni fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2014). Ketiga fungsi ini digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam menyusun desain belanja negara. Apabila APBN sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi PD tidak dilandasi oleh ketiga fungsi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak memiliki kualitas yang baik. Hal ini akan memperlebar kesenjangan ekonomi dan berdampak negatif terhadap sisi sosial masyarakat.

Seiring dengan ditetapkannya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah memulai langkah reformasi manajemen keuangan negara pada keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkah tersebut mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan reformasi dimaksud diharapkan dapat menjadikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih mandiri, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting, sebagai upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran secara sungguh-sungguh, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memaksimalkan dampak positif anggaran ke perekonomian nasional.

Penerapan sistem penganggaran baru tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut mengharuskan pemerintah untuk fokus kepada kinerja yang akan dicapai beserta anggaran yang dialokasikan pada program/kegiatan yang akan dilaksanakan (Ratnawati et al., n.d.). Hal ini menjadi penting, karena sesuai yang dikemukakan oleh (Barro,1990), penganggaran pemerintah tanpa disertai pertimbangan struktur pengeluaran yang berkualitas tidak akan memberi dampak signifikan pada perekonomian.

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

Gambar 1
PDB dan Alokasi Belanja Negara, Tahun 2005 – 2017
(dalam triliun Rupiah)

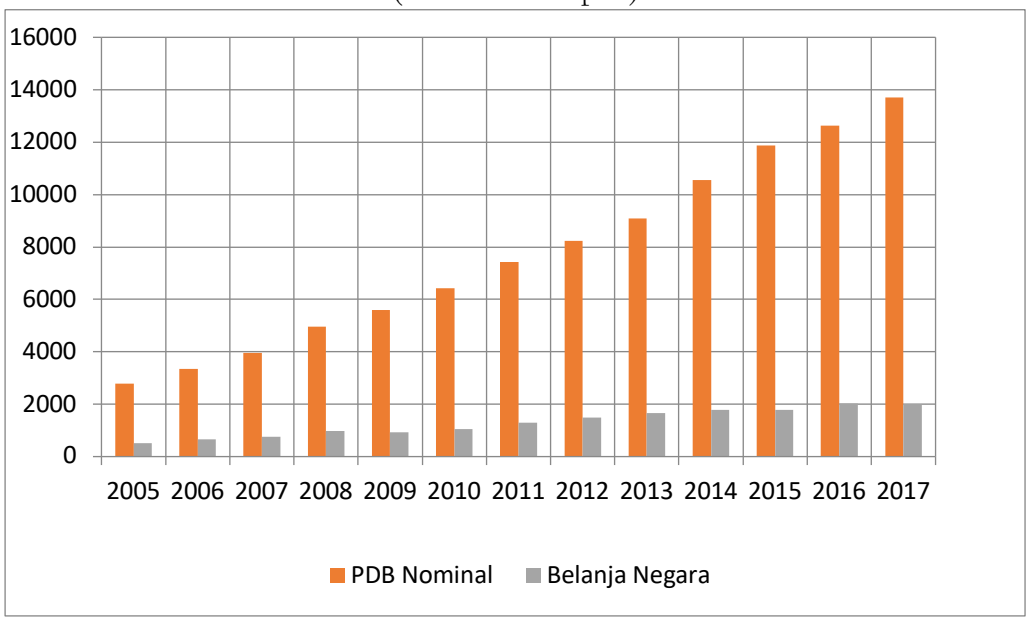

Tabel 1.
PDB dan Alokasi Belanja Negara Tahun 2005 – 2017

No	Tahun	Produk Domestik Bruto		Alokasi Belanja Negara	
		Nominal (triliun Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Jumlah (triliun Rp)	% terhadap PDB
1	2005	2.774,3	5,7	509,6	18,4
2	2006	3.339,2	5,5	667,1	20,0
3	2007	3.950,9	6,3	757,6	19,2
4	2008	4.948,7	6,0	985,7	19,9
5	2009	5.603,9	4,5	937,4	16,7
6	2010	6.422,9	6,1	1.042,1	16,2
7	2011	7.427,1	6,5	1.287,4	17,3
8	2012	8.237,6	6,3	1,491,4	18,1
9	2013	9.084,0	5,8	1.650,6	18,2
10	2014	10.542,7	5,1	1.777,2	16,9
11	2015	11.881,2	4,8	1.785,7	15,0
12	2016	12.626,5	5,2	2.036,0	16,1
13	2017	13.716,7	5,3	2.010,5	14,7

Sumber: Buku saku APBN dan Indikator Ekonomi 2013, realisasi s.d 30 September 2013 dan realisasi s.d 29 April 2016. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan Buku II Nota Keuangan beserrta RAPBN TA 2017. Catatan: Alokasi Belanja Negara Tahun 2015 – 2017 tidak memperhitungkan dana desa

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 5,62 persen, sedangkan alokasi belanja negara mengalami kenaikan rata-rata sebesar 22,65 persen sepanjang periode 2005-2017. Pertumbuhan PDB Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan kenaikan alokasi belanja negara. Di lain pihak, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat juga menjadi semakin besar.

Dalam kondisi seperti ini, peranan dan kontribusi APBN yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sangat krusial. Pelaksanaan tiga fungsi utama pemerintah dalam bidang keuangan negara harus bisa memanfaatkan sumber daya yang

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil yang berkualitas tinggi. Ketiga fungsi tersebut, yang diimplementasikan melalui kebijakan belanja negara, diharapkan mampu menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan keseimbangan primer (*primary balance*) sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan belanja negara juga dapat diarahkan untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sumber pendanaan yang terbatas diikuti dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat mengharuskan pemerintah untuk lebih cermat dan tepat dalam menggunakan sumber dayanya. Oleh karena itu, kualitas belanja (*quality of spending*) sangat penting dalam pengelolaan belanja negara. Peningkatan kualitas belanja negara tersebut melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara melalui perbaikan struktur belanja negara agar menjadi lebih produktif serta efisien dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara optimal.

Belanja negara yang berkualitas dapat diukur dengan beberapa kriteria, antara lain keberlanjutan (*sustainability*), efisiensi, dan efektivitas. Belanja dapat dikatakan *sustainable* apabila secara agregat sejalan dengan kerangka ekonomi makro jangka menengah yang menghasilkan strategi defisit/surplus dan utang yang berkelanjutan. Belanja negara dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil-hasil prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan alokasi belanja yang tidak boros. Alokasi tersebut harus berhasil mencapai target-target program pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Sedangkan kriteria lainnya adalah efektivitas. Di sisi lain, efektivitas lebih menekankan kepada hasil, sehingga kegiatan yang dibiayai harus menghasilkan output dan outcome yang berkualitas. Hal ini berarti belanja yang direalisasikan harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan berdampak positif bagi perekonomian. Melihat kondisi di atas, perlu dilihat apakah kebijakan belanja negara yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam teori pembangunan ekonomi diketahui bahwa produk domestik bruto (PDB) dan belanja negara mempunyai hubungan timbal balik yang positif. PDB adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. PDB terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor bersih. PDB menjadi dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, belanja negara merupakan semua pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pasal 11 Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan transfer ke daerah.

Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi (Abustan & Mahyuddin, 2009). Pandangan ini menjelaskan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan *exogenous* yang mengubah output agregat, atau pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pengeluaran pemerintah. Sebaliknya dalam Hukum Wagner, yaitu hukum meningkatnya ekspansi aktifitas publik, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai determinan utama pertumbuhan sektor publik, yang berarti pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

Ide yang paling penting dalam teori keuangan publik sesuai dengan dalil Musgrave (Musgrave, 1991), secara konseptual adalah mengenai pembagian anggaran pemerintah kepada fungsi : (1) alokasi; (2) distribusi; dan (3) stabilisasi. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung dari kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksi. Untuk menilai kebijakan pemerintah, haruslah

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

didasarkan pada dampak dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai dampak terhadap alokasi faktor produksi (Suparmoko, M, 2012).

Terkait pelaksanaan kebijakan fiskal, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh International Food Policy Research Institute, di Afrika dan Asia belanja negara pada sektor pertanian dan pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui *channel* yang disajikan dalam Gambar 2 (D'Souza, 2011). Kneller, Bleaney, & Gemmell (1999) menyatakan bahwa pengeluaran produktif seperti kesehatan dan pendidikan memiliki efek positif yang signifikan di negara-negara maju.

Belanja negara yang digunakan untuk investasi di bidang pertanian, pendidikan dan infrastruktur akan meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian. Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja di bidang pertanian dan peningkatan daya beli petani. Produktivitas hasil pertanian di desa juga membantu penduduk di desa untuk mendapatkan harga pangan yang murah, sehingga mengurangi biaya hidup masyarakat di pedesaan. Investasi di infrastruktur jalan desa akan membantu masyarakat pedesaan untuk menjual hasil produksinya di daerah perkotaan dengan biaya yang rendah. Pada akhirnya investasi pemerintah di bidang pertanian di daerah pedesaan akan memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan di daerah pedesaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambar 2

Government Spending and Rural Poverty

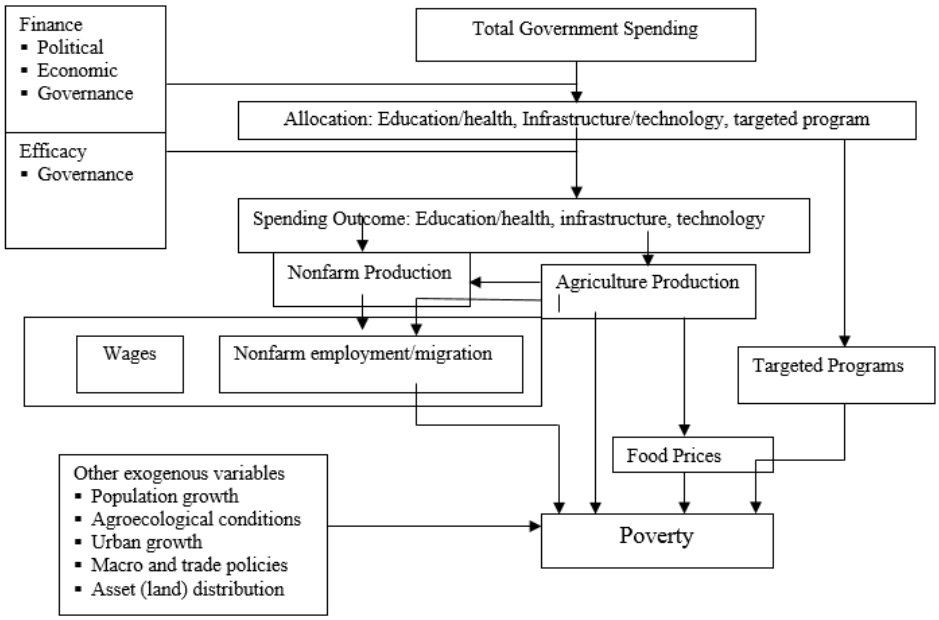

Sumber: International Food Policy Research Institute, Public Expenditure, Growth, and Poverty, the Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008.

Beberapa studi pun telah mencoba mencari hubungan dan pengaruh dari belanja negara atau pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Ebaidalla, 2013) berusaha mengetahui sifat dan arah kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional di Sudan untuk periode 1970-2008. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan jangka panjang antara belanja pemerintah dan pendapatan nasional di Sudan. Hasil tes hubungan kausalitas menunjukkan bahwa arah kausalitas berlaku dari pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil tersebut mendukung proposisi Keynesian, yang menyatakan bahwa pengeluaran publik merupakan faktor eksogen penting untuk mendorong pendapatan nasional. Selain itu, studi ini menyimpulkan

bahwa kebijakan fiskal di Sudan memainkan peran penting dalam menstabilkan perekonomian dan mencapai tujuan ekonomi.

Mehrara, Abrishami, Boroujli, & Amin (2013) mengkaji hubungan kausal antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional di Iran dengan menggunakan data tahunan selama periode 1970-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara kedua variabel tersebut. Tes kausalitas menunjukkan efek searah yang kuat dari pendapatan nasional ke pengeluaran pemerintah. Tetapi tidak ada bukti bahwa pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bahkan, hasil utama dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ada hubungan sebab akibat yang seketika (*instantaneous*) serta hubungan sebab akibat yang searah (*unidirectional*) dari pendapatan nasional ke pengeluaran pemerintah.

Studi yang dilakukan oleh Chiawa, Torruam, & Abur (2012) meneliti pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ditemukannya juga bahwa terdapat hubungan kausalitas dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran pemerintah. Hasil lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai posisi keseimbangan atau ekuilibrium. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa modal dan pengeluaran pemerintah dikelola dengan baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut juga menunjukkan perlunya mempromosikan efisiensi dalam alokasi sumber daya pada pembangunan manusia dengan mendorong partisipasi sektor swasta untuk memastikan pertumbuhan produktivitas yang intensif.

Makalah Cheng & Lai (1997) membahas mengenai kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi bersama dengan jumlah uang beredar dalam kerangka model trivariat pada data Korea Selatan untuk periode 1954-1994. Studi ini menemukan bahwa ada kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Selain itu juga ditemukan bahwa jumlah uang beredar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ghali (1997) juga melakukan studi mengenai hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, dimana hasil yang didapat adalah tidak ditemukannya bukti yang konsisten bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan PDB riil. Studi ini didukung oleh studi lainnya yang dilakukan oleh Hsieh & Kon S.Lai (1994), dimana mereka berargumen bahwa tidak ada bukti yang konsisten menggambarkan adanya kausalitas positif yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, namun tidak ditemukan juga bukti yang cukup untuk mengatakan argumen bernada negatif terhadap hubungan kausalitas antar dua variabel tersebut. Akan tetapi, studi ini menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi dalam proporsi yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara yang menjadi sampel dari studi tersebut.

. Devarajan, Swaroop, & Zou (1996) melakukan studi mengenai hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, dengan menilik lebih dalam ke komposisi dari pengeluaran pemerintah. Studi ini memberikan hasil bahwa pengeluaran pemerintah yang bersifat *current* (pengeluaran operasional) lebih signifikan positif mempengaruhi pertumbuhan, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk *capital* yang bersifat lebih produktif justru secara signifikan negative mempengaruhi pertumbuhan.

3. METODE PENELITIAN

a. Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) Konstan dan 3 (tiga) variabel yang merepresentasikan belanja negara, yaitu variabel Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Belanja non K/L, dan Transfer ke Daerah.

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

b. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) metode analisis ekonometri untuk menjawab bagaimana hubungan antara belanja negara dengan pertumbuhan ekonomi. Metode – metode tersebut adalah:

1. Analisis Hubungan Korelasi: Koefisien Korelasi *Pearson*

Untuk menguji hubungan korelasi antara variabel PDB Konstan dan variabel – variabel belanja negara, tulisan ini akan menggunakan uji koefisien korelasi *Pearson*. Koefisien korelasi *Pearson* dapat digunakan untuk menyatakan besar hubungan linear antara dua variabel kuantitatif (data berskala interval atau rasio) dan kedua variabel adalah bivariat yang berdistribusi normal. Interval kekuatan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini (Sarwono, 2009)

Tabel 2 Interval kekuatan korelasi

Koefisien	Kekuatan Hubungan
0,00	Tidak ada hubungan
0,01-0,09	Hubungan kurang berarti
0,10-0,29	Hubungan lemah
0,30-0,49	Hubungan moderat
0,50-0,69	Hubungan kuat
0,70-0,89	Hubungan sangat kuat
>0,90	Hubungan mendekati sempurna

2. Analisis Hubungan Kausalitas: Uji Kausalitas *Granger*

Untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel – variabel yang digunakan di tulisan ini, penulis akan menggunakan uji kausalitas *Granger*. Pengujian sebab akibat dalam pengertian *Granger* dengan menggunakan F-test adalah untuk menguji apakah *lag* informasi dalam variabel Y memberikan informasi statistik yang signifikan dalam menjelaskan perubahan X. Jika tidak, Y tidak ada hubungan sebab akibat *Granger* dengan X (Xie, Wang, & Liu, 2013).

3. Metode *Vector Error Correction Model* (VECM)

Metode *Vector Error Correction Model* (VECM) yang digunakan dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat apakah faktor – faktor belanja negara yang mempengaruhi pertumbuhan PDB dalam jangka panjang. Model VECM yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\Delta PDBk_t = b_0 + b_1 Bkl_{t-1} + b_2 BNkl_{t-1} + b_3 TD_{t-1} + \varepsilon_t$$

Keterangan :

$PDBk_t$ = Produk Domestik Bruto harga konstan (Miliar rupiah)
Bkl_{t-1} = Total Belanja K/L (Miliar rupiah)
$BNkl_{t-1}$ = Total Belanja Non K/L (Miliar rupiah)
TD_{t-1} = Total Transfer ke daerah & dana desa (Miliar rupiah)
b_0 = Vektor independen intersep berukuran (nx1)
b_1 = Matriks koefisien/parameter berukuran (nxn) untuk setiap i=1,2,3,...,p
ε_t = vektor *error* berukuran (nx1)
t = *time trend*

4. Metode Analisis *Impulse Response Function* (IRF)

Impulse respons function (IRF) digunakan untuk menggambarkan pergerakan dinamis atas suatu variabel akibat guncangan variabel lainnya pada suatu rentang periode tertentu. Hal ini dilakukan untuk melihat lamanya pengaruh guncangan satu variabel terhadap variabel lain hingga pengaruh tersebut hilang dan mencapai keseimbangan. IRF digunakan untuk melihat pengaruh kontemporer dari sebuah variabel dependen jika mendapatkan guncangan atau inovasi dari variabel independen sebesar satu standar deviasi. Selain itu, IRF dapat mengukur kekuatan relatif dari berbagai guncangan dan menelusuri pola dan arah transmisi guncangan. Fungsi dari *impulse response* ini pertama, untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel tertentu apabila

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

terjadi guncangan atau *shock* suatu variabel. Fungsi yang kedua adalah untuk mengetahui besarnya nilai guncangan terhadap variabel yang ada.

5. Analisis *Forecasting Error Variance Decomposition* (FEVD)

Penulis menggunakan metode forecast error variance decomposition (FEVD) karena FEVD dapat memberikan rincian tentang perubahan suatu variabel dalam periode tertentu yang timbul dari perubahan variabel yang sama dan variabel lainnya dalam periode sebelumnya. FEVD dirancang untuk menetapkan kausalitas antar variabel di luar periode sampel. Hal tersebut dilakukan dengan membagi varians dari kesalahan perkiraan variabel tertentu ke dalam proporsi disebabkan oleh inovasi setiap variabel dalam sistem termasuk dirinya sendiri. Metode ini dapat melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing variabel mempengaruhi variabel lainnya dalam kurun waktu yang panjang. FEVD menghasilkan informasi mengenai peranan variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam model. Perhitungan metode FEVD memperlihatkan seberapa besar perubahan error variance sebelum dan sesudah terjadinya inovasi yang berasal dari variabel endogen maupun variabel-variabel lainnya. Oleh karena itu, melalui metode FEVD dapat diketahui secara pasti faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi dari variabel tertentu serta memberikan informasi mengenai variabel inovasi yang lebih penting dalam model VAR.

c. Pengumpulan Data
   1. PDB Konstan: Data yang digunakan untuk PDB Konstan adalah *time series* triwulanan yang bersumber dari BPS (data sekunder), tahun 2004 : 1 sampai dengan 2015 : 4. Adapun periodenya disesuaikan dengan ketersediaan data realisasi belanja negara menurut format sistem penganggaran terpadu berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
   2. Belanja Negara (Keseluruhan): Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, berupa data realisasi triwulanan setelah berlakunya secara efektif reformasi sistem penganggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu data tahun 2005 : 1 sampai dengan 2015 : 4.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam tulisan ini, komponen belanja negara dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu belanja K/L, belanja non K/L, dan transfer ke daerah. Penulis telah melakukan empat uji ekonometrik terhadap ketiga kelompok komponen belanja negara tersebut. Hasil pengujian ekonometrik adalah sebagai berikut.

a. Hubungan korelasi dan kausalitas

Berdasarkan uji korelasi, dapat diketahui bahwa hubungan antara ketiga kelompok komponen belanja negara terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sebagai berikut,

Tabel 3 Hasil Analisis Korelasi

Variabel	PDB Konstan
Belanja K/L	Hubungan Kuat & Siginifikan
Belanja Non K/L	Hubungan Kuat & Siginifikan
Transfer Daerah	Hubungan Sangat Kuat & Siginifikan

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa ketiga komponen belanja negara tersebut memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap PDB konstan. Transfer daerah memiliki hubungan yang sangat kuat apabila dibandingkan dengan kedua kelompok komponen belanja negara lainnya.

Tabel 4 Hasil *Granger Causality*

	PDB	Belanja K/L	Belanja Non K/L	Transfer Daerah
PDB		→	→	→
Belanja K/L	TAHK		TAHK	TAHK
Belanja Non K/L	TAHK	TAHK		TAHK
Transfer Daerah	TAHK	TAHK	TAHK	

Catatan: TAHK = Tidak Ada Hubungan Kausalitas

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4, kita bisa lihat bawa adanya hubungan kausalitas satu arah dari PDB konstan terhadap setiap kelompok komponen belanja negara. Hasil ini sesuai dengan hukum Wagner, yaitu ternyata pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap belanja K/L, non K/L, dan transfer daerah, bukan sebaliknya. Kasus di Indonesia ini menyerupai hasil uji kausalitas di Iran (data 1970-2010), Nigeria (data 1977-2006), dan Malaysia (data 1960-1998) seperti yang telah dibahas sebelumnya.

b. Faktor – faktor belanja negara yang mempengaruhi pertumbuhan PDB dalam jangka panjang

Berdasarkan hasil uji ekonometrika *Vector Error Correction Model (VECM)*, penulis berhasil menemukan beberapa hasil yang cukup menarik terkait faktor – faktor belanja negara, yaitu belanja K/L, belanja non K/L, dan transfer ke daerah yang mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Tabel 5 Faktor yang mempengaruhi PDB Konstan

Jangka Panjang		
Variabel	Koefisien	t-Statistik
BELANJAKL	86.86375	-5.96342*
BELANJANONKL	22.91339	-1.34777
TRANSFERDAERAH	-98.71966	5.57731*

Tabel 5 merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji *VECM*. Pertama, hasil uji *VECM* menemukan bahwa belanja K/L, dalam jangka panjang, secara signifikan mempengaruhi PDB Konstan dalam konteks positif. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan belanja K/L maka PDB Konstan akan meningkat. Hal ini diduga sebagai akibat dari pemanfaatan belanja K/L untuk sektor-sektor produktif seperti di bidang infrastruktur, contohnya infrastruktur komunikasi, listrik, irigasi, jalan dan bangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, hasil uji ekonometrika tersebut juga menemukan bahwa transfer ke daerah, dalam jangka panjang juga berpengaruh signifikan terhadap PDB konstan namun dalam konteks negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan belanja negara di komponen transfer daerah akan menurunkan PDB konstan. Hal ini diduga disebabkan pemanfaatan dana transfer ke daerah & dana desa lebih kepada pemerataan antar daerah sebagaimana tujuan dari pemberian dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Selain itu, DAU yang lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja pegawai juga disinyalir tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, hasil berbeda ditemukan untuk komponen belanja non K/L. Hasil *VECM* menunjukkan bahwa komponen belanja non K/L tidak signifikan secara statistik terhadap PDB konstan. Hal ini berarti kita tidak dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya pengaruh dalam jangka panjang belanja non K/L terhadap PDB konstan.

c. Pengaruh guncangan di komponen belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi

Untuk mengukur pengaruh guncangan di komponen belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi, penulis menggunakan metode *Impulse Response Function (IRF)* yang hasilnya cukup bervariasi untuk setiap komponen belanja negara.

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

Gambar 3 Hasil *Impulse Response Function* (IRF)

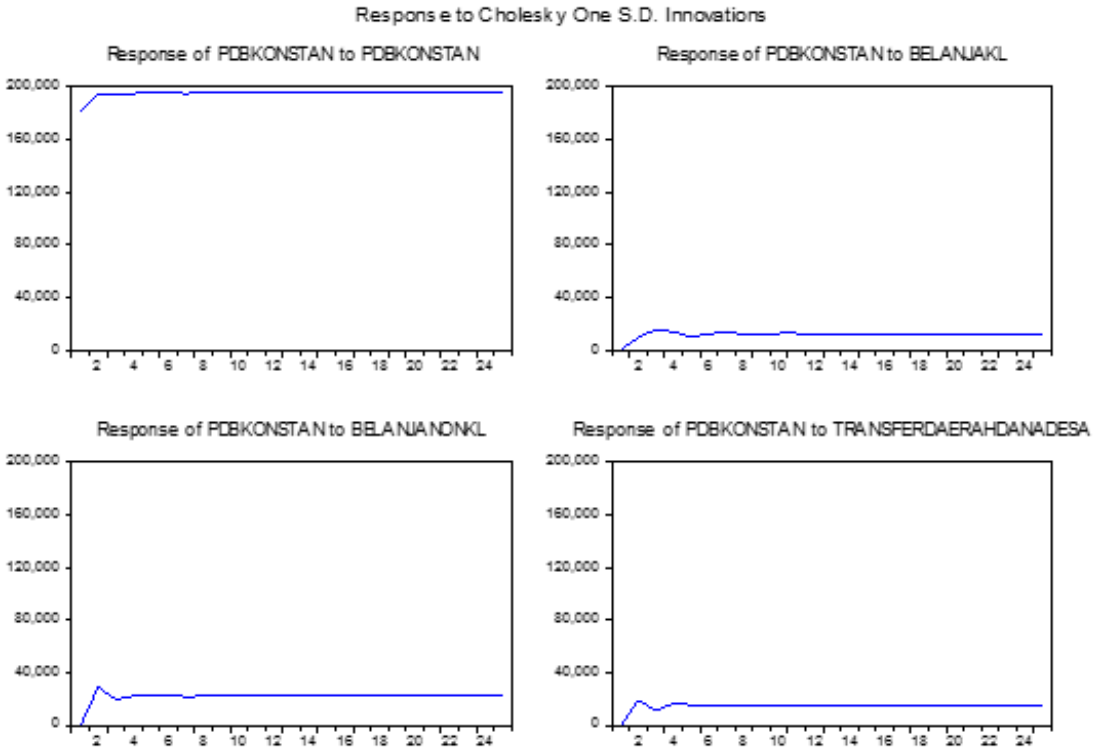

Gambar 3 merupakan hasil dari *Impulse Response Function* (IRF). Seperti yang dapat kita lihat, guncangan belanja K/L sebesar satu standar deviasi belum direspon oleh PDB Konstan pada kuartal pertama. Pada kuartal kedua, guncangan tersebut direspon positif oleh PDB Konstan sebesar 2.23 persen. Respon positif PDB Konstan akibat guncangan belanja K/L ini terus berlanjut sampai dengan di kurun waktu jangka panjang. Hal ini menyebabkan PDB Konstan meningkat dalam jangka panjang. Respon PDB Konstan terhadap guncangan belanja K/L ini mulai mencapai kestabilan pada kuartal 6.

Guncangan belanja non K/L sebesar satu standar deviasi belum direspon oleh PDB Konstan pada kuartal pertama. Pada kuartal kedua, guncangan pada Belanja Non K/L direspon secara positif oleh PDB Konstan sebesar 6.64 persen. Respon positif PDB Konstan akibat guncangan Belanja non K/L ini terus berlanjut sampai jangka panjang. Hal ini menyebabkan PDB Konstan meningkat dalam jangka panjang. Respon PDB Konstan terhadap guncangan belanja pemerintah pusat ini mulai mencapai kestabilan pada kuartal 4.

Guncangan transfer daerah dan dana desa sebesar satu standar deviasi belum direspon oleh PDB Konstan pada kuartal pertama. Pada kuartal kedua, guncangan pada transfer daerah dan dana desa direspon secara positif oleh PDB Konstan sebesar 4.35 persen. Respon positif PDB Konstan akibat guncangan transfer daerah dan dana desa ini terus berlanjut sampai jangka panjang. Hal ini menyebabkan PDB Konstan meningkat dalam jangka panjang. Respon PDB Konstan terhadap guncangan transfer daerah ini mulai mencapai kestabilan pada kuartal 6.

Dengan demikian perlu diantisipasi guncangan yang disebabkan variabel belanja K/L dan transfer daerah, mengingat dampaknya terhadap PDB Konstan memerlukan waktu yang lebih lambat untuk stabil. Hal ini dikarenakan terdapat hal yang perlu diantisipasi, yaitu variabel yang lebih lambat stabil.

d. Kontribusi komponen belanja negara terhadap PDB konstan

Untuk melihat kontribusi dari setiap komponen belanja negara terhadap PDB konstan, penulis menggunakan metode *variance decomposition* (*FEVD*). Metode ini dapat menjelaskan kontribusi dari suatu variabel terhadap suatu guncangan. Kita akan melihat kontribusi dari setiap komponen belanja negara terhadap PDB konstan selama kurang lebih 25 periode kuartal (2004 – 2015).

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

Gambar 4 *Variance Decompositon* PDB Konstan

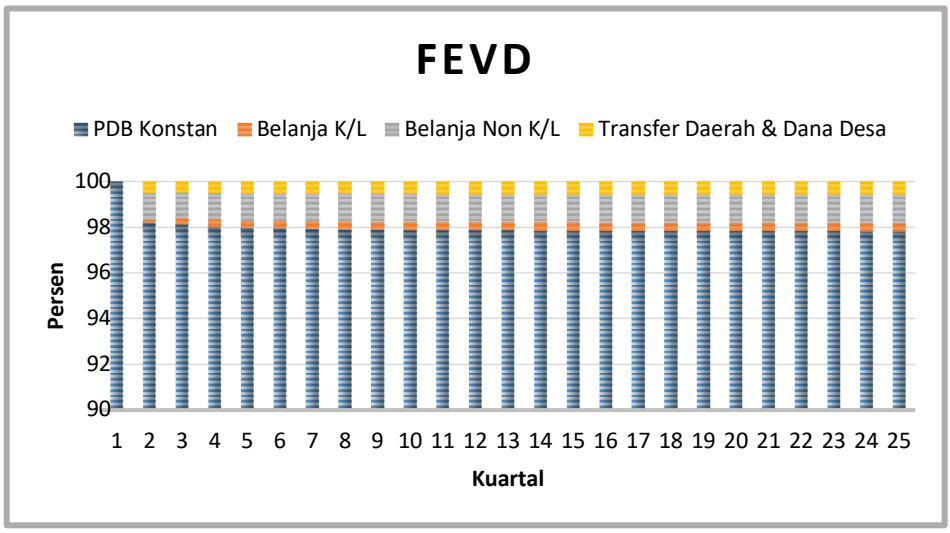

Gambar 4 merupakan gambar yang menunjukkan hasil metode *FEVD*. Hasil dari metode *FEVD* menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun pertama, fluktuasi PDB Konstan yang disebabkan oleh dirinya sendiri sebesar 100 persen. Pada kuartal kedua terlihat komponen belanja negara mulai berperan, yaitu belanja K/L sebesar 0,13 persen, belanja non K/L sebesar 1,16 persen, dan transfer ke daerah sebesar 0,49 persen.

Hasil *variance decomposition* juga menunjukkan bahwa selama 25 kuartal ke depan, peran PDB Konstan dalam menjelaskan PDB Konstan itu sendiri masih dominan yaitu sebesar 97,83 persen. Selama 25 periode kuartal, komponen belanja K/L memiliki kontribusi sebesar 0,377 persen, belanja non K/L sebesar 1,23 persen, dan transfer ke daerah sebesar 0,55 persen. Hasil ini menyimpulkan bahwa kontribusi komponen–komponen belanja negara dalam mempengaruhi fluktuasi PDB Konstan masih sangat sedikit.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Belanja negara memang menjadi salah satu alat kebijakan yang penting dan ideal digunakan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun demikian, pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda – beda, tergantung dari komponen belanja negaranya, kurun waktu, dan kontribusinya.

Dengan menggunakan tiga kelompok komponen belanja negara, yaitu belanja K/L, belanja non K/L, dan transfer daerah, belanja negara bisa memberikan dampak yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDB konstan. Pertama, PDB konstan ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ketiga komponen belanja negara tersebut, dimana hal tersebut sesuai dengan hukum Wagner. Selain itu, dalam jangka panjang, belanja K/L memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB konstan, sedangkan transfer daerah memberikan pengaruh negatif terhadap PDB konstan.

Ketiga, respon PDB konstan terhadap guncangan yang terjadi untuk setiap komponen belanja negara pun bervariasi. PDB konstan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menstabilkan efek dari guncangan belanja K/L dan transfer daerah. Di sisi lain, guncangan pada belanja non K/L relatif memerlukan waktu lebih singkat dalam menstabilkan efek dari guncangan tersebut. Terakhir, fluktuasi PDB konstan di masa sebelumnya secara konsisten menjadi faktor dominan yang membentuk PDB konstan di masa mendatang, sedangkan komponen – komponen belanja negara tidak memberikan kontribusi besar.

Berdasarkan hasil di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan agar pemerintah bisa mencapai tujuan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui kebijakan belanja negara adalah sebagai berikut:

- Melihat hasil dari uji kausalitas dimana PDB konstan memiliki pengaruh searah terhadap ketiga komponen belanja negara, maka penulis menyarankan agar pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan melalui

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

peningkatan permintaan agregat dan penawaran agregat. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mendorong investasi dan ekspor dan konsumsi, dan perkembangan berbagai lapangan usaha, yang pada gilirannya berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan dan belanja negara.

- Memperhatikan bahwa belanja K/L dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap PDB konstan secara signifikan, dan variabel transfer ke daerah dan desa dalam jangka panjang berpengaruh negatif secara signifikan, maka untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi disarankan pentingnya mempertahankan dan bahkan meningkatkan belanja K/L. Selain itu juga disarankan perlunya perbaikan dalam pola penyaluran/distribusi triwulanan dana transfer ke daerah, khususnya dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Hal ini dilakukan agar lebih memberikan kepastian sumber pendanaan secara triwulanan kepada daerah.
- Sehubungan dengan respon dari PDB konstan terhadap guncangan masing-masing belanja K/L, belanja non K/L dan transfer daerah dan desa yang menunjukkan respon yang berbeda-beda dalam hal periode waktu, maka semakin lama guncangan yang ditimbulkan, semakin perlu diantisipasi. Dalam hal ini perlu diantisipasi guncangan yang disebabkan variabel belanja K/L dan transfer daerah, mengingat dampaknya terhadap PDB Konstan memerlukan waktu yang lebih lambat untuk stabil.
- Mengingat bahwa peran fluktuasi PDB konstan di tahun – tahun sebelumnya dalam menjelaskan PDB konstan itu masih dominan, maka untuk meningkatkan PDB konstan di masa-masa mendatang kiranya pemerintah harus secara konsisten mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- Selanjutnya dalam rangka lebih mempertajam hasil penelitian ini disarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait analisis kointegrasi dan kausalitas belanja Negara dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel belanja Kementerian/Lembaga yang dirinci menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, khususnya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial, dengan menggunakan data terkini. Tidak kalah menariknya apabila dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kointegrasi dan kausalitas belanja daerah (transfer dana ke daerah dan desa) dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat simpulan dari penelitian ini bahwa variabel transfer ke daerah dan desa dalam jangka panjang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap PDB konstan.

7. DAFTAR PUSTAKA

Abustan, Mahyuddin, 2009. *Analisis Vector Auto Regressive (VAR) terhadap Korelasi antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No. 1, Juni 2009.

Barro R. 1990. *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth.* (Journal of Political Economy).

Cheng dan Lai. 1997. *Government Expenditures and Economic Growth in South Korea: A VAR Approach*. Journal of Economic Development, Vol. 22, No. 1, June 1997: 11-24.

Chiawa, Torruam, dan Abur (2012). *Cointegration and Causality Analysis ofGovernment Expenditure and Economic Growth in Nigeria*. International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 1, No. 8, 165-174.

D, Souza, G.2011. *Public Expenditures, Growth, and Poverty*. Lessons from Developing Countries. Shenggen Fan, Editor. Washington, DC. IFPRI Press Book Review : American Journal of Agricultureal Economics 3 : 249-252.

Devarajan, Swaroop, dan Zou. 1996. *The composition of public expenditure and economic growth*. Journal of Monetary Economics, 313-344.

Ebaidalla. 2013. *Causality between Government Expenditure and National Income: Evidence from Sudan*. Journal of Economic Cooperation and Development, Vol. 34, No. 4: 61-76.

Ghali. 1997. *Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia*. Journal of Economic Development.

Hsieh, E., dan Lai, K.S. 1994. *Government spending and economic growth: the G-7 experience*. Applied Economics, 535-542.

Kementerian Keuangan RI. 2011. *The Indonesian Budget Overview 2010*. Direktorat Jenderal Anggaran.

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411

Kementerian Keuangan RI. 2014. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.

Kui Xie, Yuming Wang, & Hang Liu, 2013. Based on the Granger Causality Tests the Research About the Relation Between the Real Economy and Virtual Economy in Our Country. International Journal of Business and Social Science Vol 4 No 16, December 2013.

Kneller, Bleaney, Gemmell, 1999. Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries.

Mehrara, Abrishami, Boroujli, dan Amin. 2013. *Government Expenditure and Economic Growth in Iran*. International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol.11: 76-83.

Morozumi dan Veiga. 2016. *Public spending and growth: The role of government accountability.* European Economic Review, 148-171.

Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. Erlangga.

Ratnawaty, Anny. *The Indonesian Budget Overview 2010I*, Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu RI.

Sailesh K. Jha. 1999. Fiscal Policy, *Income Distribution, and Growth.* Asian Development Bank.

Sarwono, Jonathan. 2009. Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suparmoko, M. 2012. Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta.

Wahab, Mahmoud. 2004. *Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from A New Test Specification*. Taylor and Francis Group.

Xie, Wang, & Liu.2013. Based on Granger Causality Tests the Research About the Relation Between the Real Economy and Virtual Economy in Our Country.

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V3i1.411